BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengendalian penduduk adalah suatu usaha yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk kearah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Lazimnya usaha yang dilakukan adalah melalui kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Secara umum, pertumbuhan penduduk di suatu wilayah (suatu negara atau daerah) dipengaruhi oleh tiga faktor demografi yaitu jumlah kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan migrasi. Dari tiga faktor demografi tersebut ada diantaranya yang berpengaruh positif (menambah jumlah penduduk dan ada yang berpengaruh negatif (mengurangi) jumlah penduduk. Fertilitas adalah suatu faktor demografi yang dapat menambah jumlah penduduk. Makin tinggi angka kelahiran, maka pertambahan penduduk makin tinggi. Sebaliknya angka kematian (mortalitas) maka semakin besar angka penurunan jumlah penduduk sehingga selisih antara angka kelahiran dan angka kematian memberikan kontribusi bersih terhadap pertambahan penduduk yang disebut pertambahan alamiah. Pada sisi lain migrasi terdiri atas dua komponen yaitu migrasi masuk dan migrasi keluar. Selisih antara angka migrasi masuk dengan angka migrasi keluar disebut migrasi netto yang

memberikan kontribusi bersih terhadap pertambahan penduduk yang bersumber dari faktor migrasi. Dari tiga faktor demografi tersebut, faktor yang paling besar pengaruhnya pada pertumbuhan penduduk di negaranegara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah fertilitas. Semakin tinggi tingkat kemajuan yang dicapai oleh suatu negara di bidang pembangunan sosial ekonomi, maka tingkat kesehatan masyarakat semakin baik ekonomi semakin maju dan kesejakteraan masyarakat semakin meningkat sehingga kesehatan semakin baik dan angka kematian semakin menurun demikian juga angka fertilitas menurun. Tetapi penurunan angka kelahiran lebih lambat dari angka kematian karena perubahan kelahiran tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan yang dicapai dalam pembangunan sosial ekonomi tepi juga oleh perubahan perlaku dan persepsi masyarakat terhadap nilai anak. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada kajian pengendalian penduduk melalui pengendalian kelahiran di era otonomi daerah. Di Indonesia, pengendalian penduduk dilakukan melalui pelaksanaan program KB yang ditujukan untuk mencapai tingkat kelahiran tertentu di masa yang akan datang. Sejak diterapkannya otonomi daerah terutama sejak penyerahan sebagian kewenangan penyelenggaraan program Kependudukan dan KB ke kabupaten dan kota tahun 2003, maka penanganan masalah pengendalian penduduk dan KB di tingkat kabupaten dan

kota menjadi tidak prioritas dan terabaikan dan berdampak operasional yang kurang mendapatkan dukungan pembiayaan. Demikian juga dukungan Sumber Daya Manusia baik jumlah dan kualitasnya semakin terbatas karena banyak petugas KB (PLKB) dialih tugaskan dan dimanfaatkan untuk jabatan strategis pada urusan- urusan atau bidang lain. Permasalahan ini menyebabkan program BKKBN pada tingkat Kabupaten dan kota tidak optimal dan tentu hal ini berpengaruh pada usaha pengendalian kuantitas penduduk.

Pada tahun 1970 merupakan waktu yang sangat bersejarah di bidang kependudukan bagi bangsa Indonesia karena pada tahun tersebut terjadi perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan kependudukan dari kebijakan pro natalis menjadi kebijakan anti natalis. Dengan kebijakan anti natalis maka pertumbuhan penduduk dikendalikan. Sebagai wujut dari pelaksanaan kebijakan anti natalis yang melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk, maka pada tahun 1970 pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program pengendalian kelahiran yang disebut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selama hampir tiga dekade sejak tahun 1970 sampai akhir masa pemerintahan Orde Baru (masa pemerintahan sistem sentralistik) kebijakan pengendalian kuantitas kependudukan

menjadi pusat perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional sehingga lebih banyak menyerap anggaran belanja nasional pada periode tersebut. Hasil dari kebijakan tersebut adalah laju pertumbuhan penduduk turun dari sekitar 3 persen pada periode 1950-1970 menjadi 1,45 persen pada periode 1990- 2000. Sedangkan angka TFR secara nasional mengalami penurunan yang cukup signifikan dari angka 5,6 pada tahun 1970 menjadi 2,27 pada tahun 2000. Angka TFR di Sulawesi Selatan lebih tinggi daripada TFR Indonesia dan menurun lebih lambat daripada penurunan TFR Indonesia. Angka TFR Sulawesi Selatan turun dari 5,7 pada tahun 1970 menjadi 2,4 pada tahun 2000. Sejak beralihnya sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi atau era otonomi daerah pelaksanaan KB mulai meredup, maka pembangunan yang berwawasan kependudukan terutama yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas menghadapi tantangan tersendiri. Terutama dengan keluarnya UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Program KB, seolah terlupakan karena tidak menghasilkan keuntungan. Fokus anggaran untuk pembangunan dan sektor lain yang dianggap menguntungkan.

Otonomi daerah adalah sistem yang memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten

Pada tahun 1970 merupakan waktu yang sangat bersejarah di bidang kependudukan bagi bangsa Indonesia karena pada tahun tersebut terjadi perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan kependudukan dari kebijakan pro natalis menjadi kebijakan anti natalis. Dengan kebijakan anti natalis maka pertumbuhan penduduk dikendalikan. Sebagai wujut dari pelaksanaan kebijakan anti natalis yang melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk, maka pada tahun 1970 pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program pengendalian kelahiran yang disebut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selama hampir tiga dekade sejak tahun 1970 sampai akhir masa pemerintahan Orde Baru (masa pemerintahan sistem sentralistik) kebijakan pengendalian kuantitas kependudukan menjadi pusat perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional sehingga lebih banyak menyerap anggaran belanja nasional pada periode tersebut. Hasil dari kebijakan tersebut adalah laju pertumbuhan penduduk turun dari sekitar 3 persen pada periode 1950-1970 menjadi 1,45 persen pada periode 1990- 2000. Sedangkan angka TFR secara nasional mengalami penurunan yang cukup signifikan dari angka 5,6 pada tahun 1970 menjadi 2,27

pada tahun 2000. Angka TFR di Sulawesi Selatan lebih tinggi daripada TFR Indonesia dan menurun lebih lambat daripada penurunan TFR Indonesia. Angka TFR Sulawesi Selatan turun dari 5,7 pada tahun 1970 menjadi 2,4 pada tahun 2000. Sejak beralihnya sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi atau era otonomi daerah pelaksanaan KB mulai meredup, maka pembangunan yang berwawasan kependudukan terutama yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas menghadapi tantangan tersendiri. Terutama dengan keluarnya UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Program KB, seolah terlupakan karena tidak menghasilkan keuntungan. Fokus anggaran untuk pembangunan dan sektor lain yang dianggap menguntungkan. Otonomi daerah adalah sistem yang memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk merencanakan, menentukan prioritas dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai kondisi dan kemampuan daerah termasuk penetapan struktur kelembagaan pemerintah daerah dan pengalokasian anggaran (APBD). Sejak berlakunya sistem otonomi daerah, pimpinan daerah dalam menyusun kebijakan lebih berorintasi pada kepentingan

jangka pendek dan kepentingan lokal dan kurang memperhatikan pengaruh jangka panjang dari program pengendalian penduduk. Di era tersebut kependudukan dan KB tidak termasuk skala prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah terutama setelah kewenangan urusan kependudukan dan KB diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Sebagai akibat dari perubahan sistem politik pemerintahan di Indonesia dan menurunnya perhatian terhadap pengendalian penduduk, maka baik laju pertumbuhan penduduk maupun angka TFR mengalami peningkatan pada periode 2000-2010. Laju pertumbuhan penduduk Indonesi meningkat dari 1,45 persen menjadi 1,49 persen sedangkan angka TFR meningkat dari 2,27 menjadi 2,41 pada periode tersebut. Di Sulawesi Selatan meskipun laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari 1,49 persen periode 1990-2000 menjadi 1,17 persen periode 2000-2010 tetapi angka TFR meningkat dari 2,55 pada tahun 2000 menjadi 2,60 pada tahun 2010. Turunnya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan periode tersebut hanyalah akibat dari jumlah migran keluar jauh lebih besar dari jumlah migran masuk dan juga karena pada periode tersebut terjadi pemekaran provinsi yang membentuk provinsi baru yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk tersebut mulai membayangi akan terjadinya ancaman ledakan jumlah penduduk di Indonesia. Melihat kenyataan tersebut maka

perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap upaya pengendalian penduduk mulai tumbuh kembali. Untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk, pemerintah melalui BKKBN mendorong kembali program KB agar berjalan sesuai dengan harapan. Upaya pemerintah untuk mensukseskan program KB dengan mengalokasikan anggaran yang terus meningkat setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat nasional dan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tingkat daerah. Peningkatan alokasi anggaran program KB dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Menurut Elmi (2002), penganggaran adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu. Pada masa pemerintahan Orde Baru dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, sistem penganggaran lebih dominan ditangani oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kendali perencanaan dan penentuan anggaran biaya. Pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan yang dominan menentukan jenis-jenis urusan kegiatan serta pengalokasian dana untuk pembiayaan

urusan tersebut. Jelasnya pada sistem sentralistik, pemerintah pusat terlalu banyak mencampuri urusan pemerintah daerah, hampir semua kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat. Pengalokasian dana APBN untuk pembangunan di daerah-daerah dialokasikan melalui Daftar Isian Proyek (DIP) dan DIK masing-masing departemen/lembaga non departemen serta melalui program Inpres. Sering terjadi pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari pemerintah pusat dan lokasinya di daerah-daerah sedang pimpronya ada di pusat. Sistim ini membuat daerah menjadi pasif dan tidak kreatif karena selalu menunggu arahan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Menurut Elmi (2002), sistim penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) erat keterkaitannya dengan pola yang berlaku dalam APBN yang tidak lepas dari sistim penganggaran yang diwarisi dari Undang Undang Perbendaharaan Indonesia tahun 1925. Sebelum diberlakukan Otonomi Daerah, anggaran disusun merupakan kombinasi antara klasifikasi organisasi dan objek yang dikenal dengan istilah “ line budgeting”yang berbasis input. Dalam penyusunan APBD, campur tangan pemerintah pusat terutama Bappenas dan Departemen Dalam Negeri lebih dominan baik dalam penyusunan rencana fisik maupun dalam alokasi dan pelaksanaan anggarannya. Sejak awal pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 merupakan masa transisi bagi Pemerintah

daerah dari kebiasaan sentralisasi berubah ke permulaan tugas menyusun sendiri anggarannya (APBD). Penusunan APBD sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Sejak itu APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang berbasis output. Sistim anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan langkah lebih maju dibandingkan “line item budgeting” yang berbasis input. Sistem anggaran kinerja mengutamakan hasil yang dicapai harus sepadan atau lebih besar dari biaya yng dikeluarkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 terdiri dari tiga komponen yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sangat mempengaruhi keberhasilan perekonomian suatu daerah. Menurut Lin dan Lun (2013) , jika ketiga komponen tersebut diolah dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi perekonomian daerah dengan meningkatnya nilai Produk Domestik Bruto (PDRB). Selanjutnya meningkatnya nilai PDRB akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah itu sendiri maupun karena meningkatnya pengalokasian

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah, Apakah Pengaruh Integritas Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanadi Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Integritas Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Parepare

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semuan pihak:

1. Manfaat ilmiah

   Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmiah di bidang audit akuntansi, khususnya pengkajian dibidang keuangan milik daerah.

2. Manfaat praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber saran bagi pemerintah daerah Kota Parepare didalam menetapkan kebijakan dalam integritas terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Integritas

   a. Pengertian Integritas

      Integritas adalah adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipocrisy (hipokrit atau munafik).

      Seorang dikatakan “mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya (Wikipedia). Mudahnya, ciri seorang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan perbuatan bukan seorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Seorang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan banyak wajah dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya.Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan (trust) dari pegawainya. Pimpinan yang berintegritas

dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya.

Integritas adalah sikap jujur, transparan, berani, bijaksana dan tanggungjawab auditor dalam melaksanakan tugas audit. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas audit. Kelima unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya (Ayuningtyas, 2012).

Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil

pemeriksaannya. Mabruri dan Winarna (2010) menyatakan bahwa auditor yang memiliki integritas yang baik berarti auditor tersebut sudah dapat mencapai

kualitas audit yang baik dan hasil penelitiannya menemukan bahwa integritas

berpengaruh terhadap kualitas audit. Queena (2012) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi dari anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor dalam segala hal dapat jujur dan dalam batasan objek pemeriksaan dapat berterus terang. Kepentingan dan keuntungan pribadi tidak dapat mengalahkan pelayanan kepada masyarakat dan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menguji kembali pengaruh integritas terhadap kualitas audit dengan hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut.

Konon, orang-orang Tiongkok kuno merasa tidak aman dengan kelompok Barbar Utara, mereka sering menghadapi serangan dari kaum Barbar itu. Jadi ada semacam permusuhan di antara mereka. Orang-orang Tiongkok kuno menginginkan rasa damai dengan kelompok Barbar tersebut, maka mereka pun membangun tembok besar yang cukup

tinggi. Dengan itu mereka yakin bahwa tidak seorang pun bisa memanjat tembol itu, tembok itu sangat tebal sehingga tidak mudah untuk dihancurkan. Terjadi bahwa selama seratus tahun sejak tembok itu dibangun ada setidaknya tiga kali serangan musuh dialami oleh Tiongkok, tetapi tidak ada satu orang pun berhasil masuk melewati tembok itu karena tinggi, tebal, dan sangat kuat. Suatu ketika, musuh menyuap penjaga pintu gerbang perbatasan itu. Yang terjadi kemudian adalah musuh berhasil masuk dan melakukan penyerangan. Orang Tiongkok kuno itu berhasil membangun tembok batu yang kuat dan dapat diandalkan namun gagal membangun integritas pada generasi berikutnya. Seandainya, penjaga pintu gerbang tembok itu memiliki integritas yang tinggi, ia tidak akan menerima uang suap, yang tidak hanya menghancurkan dirinya melainkan juga orang lain. Integritas adalah sesuatu yang terkait langsung dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi. Kepemilikan integritas hanya bisa dikatakan kepada individu, bukan kepada keluarga, orangtua atau saudara. Integritas seorang ayah tidak serta merta menjadi integritas anaknya. Dalam cerita tersebut, kerapian kerja kelompok, berhasil membangun tembok yang baik dan kuat, tidak serta merta menjamin bahwa individu-individu yang ada di dalamnya

juga otomatis memiliki ketahanan diri yang kuat. Penguatan utama yang mesti dilakukan adalah penguatan diri individu, yang menguatkan diri masing-masing anggota kelompok atau generasi berikutnya, untuk memiliki integritas diri yang baik dan kuat.

Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Sukriah, dkk 2009). Kemudian Wibowo (2006) menyebutkan integritas auditor internal menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengandalan atas judgment mereka. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Sunarto (2003) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima

kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP, 2005).

Integritas merupakan suatu sikap yang mutlak diperlukan bagi seorang auditor. Sunarto (2003) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Integritas menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat akan suatu profesi hal ini di karenakan integritas merupakan kualitas yang menguji tatanan nilai tertinggi bagi suatu profesi.

Dari cerita, integritas diri dapat diartikan sebagai suatu ketahanan diri untuk tidak tergoda berbagai desakan untuk memikirkan dan mengutamakan kepentingan dan atau keuntungan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan dan nasib orang banyak, dengan tanggung jawab hal itu sedang berada di tangannya. Integritas diri berkaitan dengan sikap selalu mengedepankan tanggung jawab, kepercayaan, dan kesetiaan terhadap janji. Integritas berkaitan dengan kemampuan menahan dan mengendalikan diri dari berbagai godaan yang akan menghancurkan harkat dan martabat mulia diri sendiri. Orang yang memiliki integiritas adalah

orang yang bisa diandalkan, dipercaya, dan diteladani. Kata integrity memiliki konotasi etis, dan menurut Minkes, et al. (1999), perilaku etis berkaitan dengan “ought” atau “ought not”, bukan hanya “must” dan “must not”. Oleh karena itu terdapat ukuran-ukuran lain yang terletak di belakang apa yang dituntut hukum atau ukuran-ukuran lain yang lebih mentitikberatkan pada pertimbangan keuntungan. Jadi masalah integritas tidak bisa dibatasi hanya pada hal-hal yang kelihatan saja atau yang dapat diukur dari sudut pandang butir-butir hukum. Perilaku yang dapat diamati dan dianggap sesuai dengan aturan atau hukum, belum tentu juga etis. Integritas adalah suatu konsep yang biasanya digunakan dalam diskusi formal dan informal tentang leadership dan teori-teori organisasi, namun demikian tidak begitu jelas dirumuskan dan dimengerti (Rieke & Guastello, 1995). Sebagai contohnya, dalam literatur yang ada, kata seperti integrity, honesty, and conscientiousness sering tidak dibedakan, dan cenderung digunakan sebagai istilah yang dapat dipertukarkan tanpa keterangan lebih lanjut (Becker, 1998)

1). Menurut Henry Cloud

Menurut Henry Cloud, ketika berbicara mengenai integritas, maka tidak akan terlepas dari upaya untuk

menjadi orang yang utuh dan terpadu di setiap bagian diri yang berlainan, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insane manusia.

2). Menurut KBBI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

3). Menurut Ippho Santoso

Menurut Ippho Santoso, integritas sering diartikan sebagai menyatunya pikiran, perkataan dan perbuatan untuk melahirkan reputasi dan kepercayaan. Jika merujuk dari asal katanya, kata integritas memiliki makna berbicara secara utuh dan lengkap / sepenuh – penuhnya.

4). Menurut Andreas Harefa

Menurut Andreas Harefa, integritas merupakan tiga kunci yang bias diamati, yakni menunjukkan kejujuran,

memenuhi komitmen, dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten.

5). Menurut Jacobs

Integritas juga telah didefinisikan dengan menekankan konsistensi moral, keutuhan pribadi, atau kejujuran (di dalam bahasa nakademik misalnya).

b. Ciri-ciri Integritas

1) Orang yang tidak memakai kedok
2) Orang yang bertindak sesuai dengan ucapan
3) Sama di depan dan di belakang
4) Konsistenan tara apa yang diimani dan kelakuannya
5) Konsistenan taranilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan

c. Manfaat Integritas

1) Secara fisik kita merasa sehat dan bugar
2) Secara intelektual otak kita terlatih berpikir secara ilmiah
3) Secara emosional kita menjadi manusia yang termotivasi, mampu menyesuaikan diri terhadap situasi apa pun
4) Secara spiritual kita mampu memaknai berbagai pengalaman kita, mampu melihat berbagai fenomena

kehidupan dalam perspektif yang lebih dalam, utuh dan menyeluruh

5) Secara social kita semakin mampu membangun hubungan kemanusiaan

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada kepada entitas pelaporan dalam dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam hal ini akuntabilitas dapat diimplementasikan dengan baik apabila menerapkan akuntansi berbasis akrual. Sektor pemerintahan memerlukan bentuk laporan keuangan yang berbeda dengan sektor privat karena perbedaan akuntabilitas yang dihadapi.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas keuangan

merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2003). Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2004). Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dalam menjalankan program dan kegiatan untuk melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas (accountability) secara bahasa dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban (Ihyaul Ulum, 2004). Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya (Budi Mulyana, 2006). Menurut The Oxford Advance Learner's Dictionary (dalam LAN RI dan BPKP, 2001), akuntabilitas adalah required or expected to give an explanation for one's action. Artinya dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan. J.B. Ghartey (dalam modul Pusdiklatwas BPKP, 2007) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Sjahruddin Rasul (dalam modul Pusdiklatwas BPKP, 2007) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan "seseorang" atau "sekelompok orang" terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, "seseorang"

tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat. Miriam Budiardjo (1998) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Senada dengan Miriam Budiardjo, dalam konteks organisasi sektor publik Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung.

Dalam konteks organisasi sektor publik, Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal

   Akuntabilitas vertical adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

2) Akuntabilitas horizontal

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat.

Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Masalahnya adalah apakah akuntabilitas keuangan yang dibuat oleh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu akuntabilitas keuangan yang berkualitas. Akuntabilitas keuangan yang berkualitas memuat informasi yang akurat/handal dan valid yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah, sekaligus sebagai perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada instansi pemerintah yang bersangkutan (Mohamad, 2004:278). Untuk menghasilkan akuntabilitas keuangan yang berkualitas perlu didukung dengan unsur pengawasan, hal ini diperlukan agar akuntabilitas keuangan berisi informasi yang tidak

mengandung kesalahan yang material dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan fungsional dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan (PP No 20 Tahun 2001). Halim (2004:258) menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas, dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian ekstern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Public Accountability hanya dapat terwujud dengan adanya sistem pengawasan yang memadai dari DPRD dan menuntut adanya lembaga audit yang professional, independen dan obyektif (Halim, 2002:28). Jadi dengan adanya pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya pengawasan intern oleh inspektorat daerah dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas Selain melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.60 Tahun 2008, Inspektorat juga berperan dalam meningkatkan dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern yaitu dengan melakukan

pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern yang baik, pertanggungjawaban dapat terwujud. Salah satu indikator dari sistem pengendalian intern adalah adanya pemeriksaan yang independen terhadap pelaksanaan. Jika pemeriksaan ini dilaksanakan secara baik maka akan timbul kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang merupakan indikator dari akuntabilitas publik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Undang-undang dibidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini akan tercapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masingmasing. Untuk itu dibutuhkan sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah

dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan asset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perrundang-undangan. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu 3 ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki sistem informasi akuntansi yang handal, dan mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Surya (2004) menunjukkan adanya hubungan yang positif dan pengaruh yang signifikan antara pengendalian intern terhadap penerapan akuntabilitas. Dengan masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas tentunya dapat membuka lebar peluang terjadinya manipulasi data yang berujung pada kecurangan. Salah satu upaya mencegah terjadinya kecurangan yang merupakan unsur utama perbuatan korupsi ini adalah dengan meningkatkan dan membangun pengendalian intern yang baik dan menyeluruh. Pengendalian intern merupakan upaya yang dilakukan

mencakup unsur-unsur pengendalian intern: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dipercayanya informasi dan data, serta ditaatinya peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan pengendalain intern secara baik dan efektif pada suatu pemerintahan, maka akan meningkatkan kualitas akuntabilitas publik dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut.

Tetclock (1984) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat sesorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannnya. Manakala Libby dan Luft (1993), Cloyd (1997) dan Tan dan Alison (1999) melihat ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu. Pertama, seberapa besar motivasi mereka untuk meyelesaikan pekerjaan tesebut. Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatankegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut Libby dan Luft (1993), dalam kaitannya dengan akuntabilitas

seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi tinggi dalam mengerjakan sesuatu.

Kedua, seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan (Cloyd, 1997) dan ketiga, seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keingian dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Menurut Tan dan Alison (1999), seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor/manajer/pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah. Meissier dan Quilliam (1992) meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap proses kognitif seseorang dalam bekerja. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa subjek dengan akuntabilitas tinggi melakukan proses kognitif yang lebih lengkap. Sejalan dengan penelitian Meissier dan Quilliam (1992), Teclock dan Kim (1987) juga meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap proses kognitif seseorang. Hasil

penelitiannya membuktikan bahwa subjek yang diberikan instruksi diawal (*postexposure accountability*) bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan, melakukan proses kognitif yang lebih lengkap, memberikan respon yang lebih tepat dan melaporkan keputusan yang lebih realistis. Cloyd (1997) meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor. Hasil penelitian Cloyd (1997) membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi. Penelitian Cloyd (1997) ini dikembangkan oleh Tan dan Alison (1999) dengan menilai kualitas hasil kerja berdasarkan kompleksitas kerja yang dihadapi. Hasil penelitian Tan dan Alison (1999) ini tidak konsisten dengan Cloyd (1997). Tan dan Alison (1999) membuktikan bahwa akuntabilitas (secara langsung) tidak mempengaruhi kualitas hasil kerja baik untuk pekerjaan dengan kompleksitas kerja rendah, menengah ataupun tinggi.

Akuntabilitas yang harus dimiliki oleh akuntan publik dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya menurut Mulyadi dan Kanaka (1998) dalam Reni (2010) ada dua, yaitu: (a)

Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Pasal 4 Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur mengenai penjagaan kerahasiaan informasi yang diperoleh akuntan publik selama penugasan profesionalnya. Informasi yang diperoleh akuntan publik selama ia menjalankan pekerjaannya tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga, kecuali atas izin kliennya. Namun jika hukum atau negara menghendaki akuntan publik mengungkapkan informasi yang diperolehnya selama penugasannya, akuntan publik berkewajiban untuk mengungkapkan informasi tersebut, tanpa harus mendapat persetujuan dari kliennya. (b) Menjaga mutu pekerjaan profesionalnya Pasal 5 Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur kewajiban akuntan publik untuk menjaga mutu pekerjaan profesionalnya. Setiap akuntan publik harus bisa mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan lain pada saat yang bersamaan, yang bisa menyebabkan penyimpangan objektivitas atau tidak konsisten dalam pekerjaanya.

b. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas pada penelitian Singgih dan Bawono (2010) menggunakan tiga indikator yaitu : motivasi, pengabdian pada profesi, dan kewajiban sosial. Yang juga akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.

1) Motivasi

Mardisar dan Sari (2007) mengatakan motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Robbins (2008) dalam Singgih dan Bawono (2010), motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Jika dikaitkan dengan dunia kerja motivasi merupakan dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Dengan adanya motivasi dalam bekerja, maka auditor diharapkan lebih memiliki intensitas, arah, dan ketekunan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu.

2) Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan

dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan 17 meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi (Singgih dan Bawono, 2010).

3) Kewajiban social

Rendy (2007) dalam Singgih dan Bawono (2010) mengatakan bahwa kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Jika seorang akuntan menyadari akan betapa besar perannya bagi masyarakat dan bagi profesinya, maka ia akan memiliki sebuah keyakinan bahwa dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, maka ia akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan profesinya tersebut. Maka ia akan merasa berkewajiban untuk memberikan yang terbaik

bagi masyarakat dan profesinya tersebut dengan melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mempermudah pembahasan proposal ini, penyusun berusaha mencar ireferensi yang relevan dengan topik yang diangkat baik dari kitab-kitab, buku- buku,maupun karya ilmiah.Sejauh yang penyusun ketahui memang telah banyak ditemukan baik buku maupun kitab-kitab yang membahas masalah loyalitas konsumen terhadap suatu produk, diantara penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

No	Nama peneliti	Tahun	Variabel	Hasil penelitian
1.	Harmawati	2016	penerapan sistem akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas keuangan daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah,

				hasil ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan terutama dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah, hal ini disebabkan karena peralatan, *software* pendukung dan penggunaan jaringan internet yang masih sering mengalami kendala serta sumber daya

				manusia yang masih perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan profesionalitas tugas.
2	Hendry Andres Maith	2013	Laporan keuangan dan kinerja keuangan	Berdasarkan analisis rasio keuangan din interpretasikan terhadap item-item yang terdapat dalam laporan keuangan kemudian hasilnya di hitung untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan
3	Sri Rahayu	2010	CSR, GCG	Berdasarkan hasil

			dan kinerja keuangan	Pengujian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian. ROE tidak berpengaruh terhadap Tobins Q, begitu pula dengan pengungkapan CSR yang tidak mampu memoderasi hubungan antara ROE dengan Tobins Q walaupun arahnya negative
4	Handayani	2011	meneliti kinerja keuangan	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasilnya

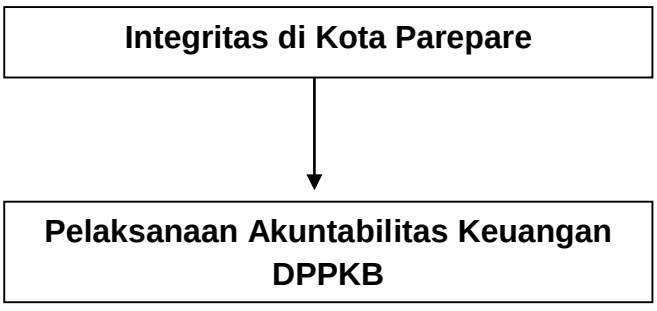
				menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada perusahaan industri tekstil yang terdaftar di BEI secara keseluruhan pada tahun 2006, kinerja keuangan perusahaan yang dinilai paling baik adalah PT. Ricky Putra Global indo Tbk. Untuk tahun 2007 dan 2008 yang memiliki kinerja paling baik adalah PT.

				Polychem Indonesia Tbk.
5	Wiharta Rahardjo	2010	Kinerja keuangan	Berdasarkan beberapa posisi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia semakin membaik.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir peneliti yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian. Adapun kerangka konseptual yang disusun peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2



Dalam bagan kerangka konseptual yang tergambar diatas diperlihatkan bahwa peneliti akan langsung meneliti tentang integritas di kota Parepare kemudian mencari pengaruh yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare.

D. Hipotesis

Di duga bahwa integritas pegawai dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota parepare tidak sejalan dengan laporan keuangan

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian

   Berdasarkan rancangan yang telah dilakukan peneliti, maka untuk penelitian ini yang berjudul **Pengaruh Integritas Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare**. Adapun lokasi penelitian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare di Jl. Jend. Sudirman No. 107, Cappa Galung, Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

   Dalam memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti bukanlah waktu yang sebentar, melainkan butuh waktu yang cukup lama demi keakuratan data yang akan diolah dan disajikan. Untuk itu, waktu penelitian ini dilaksanakan dari Bulan November tahun 2019 sampai dengan Februari 2020 (kurang lebih 12 pekan).

B. Populasi Dan Sampel

1. Populasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Parepare yang terdiri dari 8 orang,

2. Sampel Penelitian

   Sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel adalah beberapa jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian. Sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan tidak dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Hal ini sangat tergantung pada sifat populasi, terutama dalam keterbatasan anggota dalam wilayah penelitian atau dalam kategori tertentu atau tergantung pada variasi populasi.

   Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus total sampling dimana peneliti mengunakan keseluruhan dari total populasi sebagai sampel dimana terdiri dari 8 orang ASN di dinas pengendaliian penduduk dan keluarga berencana kota parepare

C. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap pelaksaan akuntabilitas pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare. Adapun definisi operasional sebagai berikut :

1. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya.
2. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 1993). Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner menurut sekarang dalam Sugiyono (2007) adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban.

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

   Dalam penelitian ini diperlukan data sebagai bahan informasi untuk dijadikan alat analisis yaitu:

   a. Data kuantitatif

      Yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka.

b. Data kualitatif

Penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dibagi kepada responden yaitu ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana Kota Parepare.

2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Person merupakan data yang diperoleh melalui personal dalam perusahaan atau instansi terkait dengan pokok pembahasan,paper merupakan data yang diperolehdari suatu instansi terkait berupa laporan tertulis atau dokumen yang signifikan, place merupakan data yang diperoleh dari suatu tempat penelitian baik secara lisan maupun secara tertulis.

F. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bereancana Kota Parepare. Untuk menganalisa pengaruh analisa data ini dilakukan dengan menggunakan model regresei sederhana dengan menggunakan fasilitas program SPSS (Statistic Peckage for Social Sciences). Dalam model atau pesamaan tersebut pengaruh integritas terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan dalam suatu bentuk fungsi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

(Sofyan Siregar, 2013)

Dimana :

Y :Integritas

X_1 : Akuntabilitas Keuangan

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

Alat uji yang digunakan

a. Uji Normalis

Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terkait dan variabel bebas keduanya terdistribusi normal atau tidak. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas probability plot. Normalitas data dapat dilihat dari menyebaran data (titik-titik) pada garis diagonal.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Semakin besar R^2 menyatakan bahwa asumsi akan semakin mendekat kenyataan yang sebenarnya.

c. Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji apakah sacara individu ada pengaruh antara variabel-variabel bebas dengan variabel

terikat maka dilakukan pengujian secara parsial dengan melihat tingkat signifikan nilai t pada 5%. Jika $t_{hitung} < t_{tabel,}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya koefisien regresi variabel bebas tidak berpengaruh pada variabel terikat secara signifikan. Jika $t_{hitung} .t_{tabel,}$ maka H_0 ditolak han H_a diterima, artinya variabel bebas sangat mempengaruhi variabel terikat secara signifikan (Sugiyono,2015)

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Instansi

Dari butir-butir arahan GBHN Tahun 1999 dan perundang-undangan yang telah ada, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Arahan GBHN ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan kelembagaan keluarga berencana nasional di daerah mengalami masa-masa kritis. Sesuai dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menyatakan bahwa sebagian urusan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota selambat-lambatnya Desember 2003. Hal ini sejalan dengan esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 (telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 32

Tahun 2004). Dengan demikian tahun 2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN. Undang-Undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Visi BKKBN adalah "Penduduk Tumbuh Seimbang 2015" dengan misi "mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera". Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang tersebut di atas. Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN (pasal 54 ayat 1 dan 2).

Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Renstra BKKBN tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya.

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terletak di Jl. Jendral Sudriman No. 107 Kelurahan Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dulunya bernama BKBPP (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Batas kerja wilayah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana meliputi semua kecamatan yang ada di Kota Parepare yaitu :

1. Kecamatan Soreang
2. Kecamatan Ujung
3. Kecamatan Bacukiki
4. Kecamatan Bacukiki Barat

Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare pada tahun 2018 berjumlah 54 orang, yang terdiri dari 39 orang ASN , 2 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 13 orang Pegawai Harian Lepas (PHL), Tingkat pendidikan dan kepangkatan bervariasi. Jumlah aparatur yang berstatus PNS yang berkualifikasi pendidikan, Strata 2 (S2) berjumlah 1 orang, Strata 1 (S1) Sebanyak 33 orang, Diploma 3 (D3) berjumlah 4 orang dan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 15 orang.

Dari segi kepangkatan, aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 11 orang aparatur berpangkat Golongan III, dan 3 (tiga) orang aparatur berpangkat Golongan II. Untuk jabatan eselon, terdiri dari 1 (satu) orang IIb, 1 (satu) orang eselon IIIa, 2(dua) orang eselon IIb, dan 7 orang eselon Iva, dan 23 orang tenaga fungsional serta 9 orang merupakan staf.

Tenaga Fungsional dalam hal ini adalah penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) yang terbagi di 22 kelurahan se-kota

parepare. Adapun saat ini Dinas Pengendalian Penduduk telah memiliki balai penyuluhan KB di 4 Keceematan yang dimana di pergunakan untuk kegiatn-kegiatanKIE dan advokasi program keluarga berencana.

Dalam pelaksanaan KIE dan Advokasi keluarga berencana KB para PLKB dilengkapi sarana dan prasarana berupa sepeda motor, PDH, tablet android, kamera, dan alat-alat KIE lainnya yang digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.

1. Visi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare menetapkan visi sebagai berikut :

"Terwujudnya masyarakat parepare peduli keluarga kecil bahagia sejahtera yang berwawasan kependudukan menuju masyarakat madani dan bermartabat".

Makna dari visi tersebut di atas adalah :

a. Terwujudnya seluruh Masyarakat Parepare peduli keluarga kecil Bahagia Sejahtera mengandung makna bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare peduli keluarga kecil, diharapkan keluarga terdiri dari 2 (dua) anak cukup serta ikut Ber KB dalam upaya menurunkan angka kelahiran , angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

b. Berwawasan Kependudukan mengandung makna bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare akan mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan daerah yang berwawasan kependudukan

c. Masyarakat madani mengandung makna bahwa Masyarakat yang beradab menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Bermartabat mengandung makna bahwa harkat dan harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) keluarga yang dapat dijadikan teladan dalam lingkungannya.

2. Misi

a. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera

Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anak yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota, antar keluarga, masyarakat dan lingkungan.

b. Meningkatkan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam hal ini maka perlu dilakukan revitalisasi program Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana sehingga tepat arah dan sasaran.

c. Meningkatkan Ketahan dan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam hal pendidikan, kesehatan, hukum, , sosial politik, lingkungan hidup dan ekonomi serta hak – hak reproduksi.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare diatur dalam Peraturan WaliKota Parepare Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare. Dalam struktur organisasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Parepare, dengan tugas pokok dan fungsi :

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
i. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare dibantu oleh :

1. Sekretaris

   Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

   Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekertariatan, sekertariat dibantu oleh 2 (dua) orang kepala sub bagian, yaitu :

   a. Kepala sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
   b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

   Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan penggerakan di daerah.

   Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala Seksi, yaitu :

   a. Kepala Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan;
   b. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB;

c. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga dan Pengolahan Data.

3. Kepala Bidang Keluarga Berencana

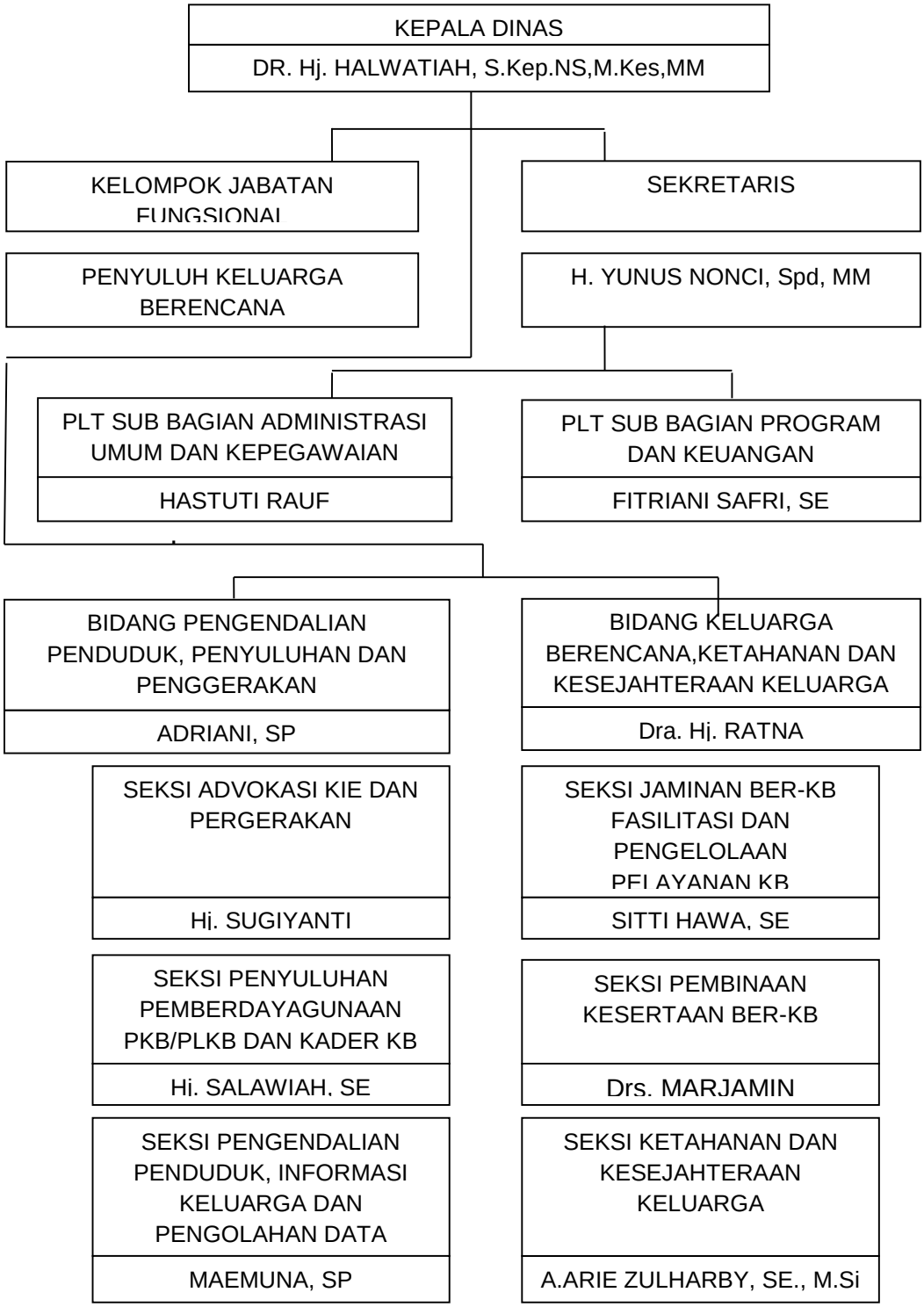
Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu :

a. Kepala Seksi Jaminan ber–KB
b. Kepala Seksi Fasilitasi dan Pengelolaan Pelayanan KB.
c. Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan ber – KB.

C. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PAREPARE

Table 4.1



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis dan Pebahasan

1. Deskripsi Responden

   Gambaran tentang profil responden dalam peneitian ini ditunjukkan dengan memberikan informasi mengenai keterangan tentang umur responden, pendidikan dan masa kerja dari responden pada ASN yang yang bekerja pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi tempat peneliti melakukan penelitian.

2. Deskripsi Responden Menurut Umur

   Adapun deskripsi responden menurut umur dapat dilihat pada table berikut :

Table 5.1

Table menurut umur pada dinas PP & KB Kota PAREPARE

No	Umur Responden	Jumlah	Frekuensi
1	25 tahun – 40 tahun	2	25%
2	41 tahun – 50 tahun	2	25%
3	51 tahun – 60 tahun	4	50%
Jumlah		8	100%

Sumber : Hasil Kuesioner

Berdasarkan table 5.1 dapat diketahui bahwa responden menurut umur, pada umur responden 25 s/d 40 tahun sebanyak 2 responden, umur responden 41 s/d 50 tahun sebanyak 2 responden dan umur responden 51 s/d 60 tahun sebanyak 4 responden.

3. Deskripsi respoden menurut Latar belakang pendidikan

Adapun latar belakang pendidikan dari responden dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 5.2

Latar belakang pendidikan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare

No	Latar belakang pendidikan	Jumlah	Frekuensi
1	SLTA/ Sederajat	2	25%
2	Sarjana S1	5	62,5%
3	Sarjana S2	1	12,5%
Jumlah		8	100%

Sumber : Hasil Kuisioner

Berdasarkan table 5.2 dapat diketahui bahwa terdapat 1 responden yang latar belakang pendidikan Sarjana S2 kemudian 5 responden yang latar belakang pendidikan Sarjana S1, kemudian terdapat 2 responden yang latar belakang pendidikan SLTA/Sederajat.

4. Deskripsi Responden Menurut Masa Bekerja

Lama bekerja dari responden dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 5.3

Masa bekerja responden pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare

No	Lama bekerja	Jumlah	Frekuensi
1	5 - 10 Tahun	2	25%
2	10 - 25 Tahun	3	37,5%
3	25- 40 Tahun	3	3/,5%
Jumlah		8	100%

Sumber : Hasil Kuisioner

Dari tabel 5.3 dapat diketahui bahwa jumlah responden yang telah bekerja selama 5 - 10 tahun sebanyak 2 orang responden, selanjutnya jumlah responden yang bekerja selama 10 - 25 tahun sebanyak 3 orang, kemudian jumlah responden yang bekerja selama 25 – 40 tahun sebanyak 3 orang.

B. Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *product moment pearson correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai r hitung yang merupakan nilai item dari *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%). Dalam

pengujian validitas data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Berikut ini disajikan hasil dari uji validitas dari masing-masing variabel

Table 5.4 Hasil Uji Validitas Instrumen pada Taraf α = 0,05

Integritas (X)		
X.1	.608**	Valid
X.2	.545**	Valid
X.3	.636**	Valid
X.4	595**	Valid
Akuntabilitas Keuangan (Y)		
Y_1	610**	Valid
Y_2	.698**	Valid
Y_3	607**	Valid
Y_4	.618**	Valid
Indikator	**Koefisien Korelasi**	**Keterangan**

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel akuntabilitas keuangan (Y) dan integritas (X) yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai *Corrected Item- Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

2. Uji Reliabilitas

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda, tetapi pertanyaan mendasar untuk mengukur reliabilitas data adalah bagaimana konsistensi data yang dikumpulkan. Pengukuran reliabilitas menggunakan indeks numerik yang disebut dengan koefisien. Konsep reliabilitas dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu koefisisen stabilitas, koefisien ekuivalensi dan reliabilitas konsistensi internal.

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan realibel jika dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α), koefisien realibilitas > 0,60.

Table 5.5

Hasil Uji Relibilitas Instrumen pada Taraf α = 0,05

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
Integritas (X)	0,747	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan (Y)	0,745	Reliabel

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha dari* semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Integritas dan Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel

C. Regresi Sederhana

1. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier Sederhana. Hal ini dimaksudkan untuk menguji variabel independen (Akuntabilitas Keuangan) terhadap variabel Dependen (Integritas) dengan melihat kekuatan hubungan antar kedua variabel. Berikut adalah tabel dari hasil pengujian :

a. Koefisien Determinan (R^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentasi pengaruh variabel independen secara bersama - sama terhadap variabel dependen

Table 5.6

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	775[a]	.600	.583	.58977

Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui koefisien determinasi (*R Square)* sebesar 0,600. Hal ini berarti 60% variabel akuntabilitas keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Integritas Sedangkan sisanya (100% - 60% = 40%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

1. Uji Coefficients[a]

   analisis regresi linier sederhana mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier, yang melibatkan satu variabel bebas *(independent variable),* digunakan sebagai alat untuk memprediksi besarnya nilai variabel tergantung *(Dependent variable)"*. Berikut hasil analisis yang menggunakan program SPSS

Tabel 5.7

Hasil Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.600	2.727		5.355	.483
	X	.500	.085	.775	5.874	.000

Berdasarkan tabel 5.8 diatas diketahui koefisien regresi untuk variabel independen menghasilkan nilai yang bernilai positif . Jika dituliskan ke dalam persamaan regresi linier sederhana maka akan menjadi:

Y = a + bX

Y = 14,600 + 0.500x

Berdasarkan persamaan Tabel 5.9 diketahui Nilai konstanta sebesar 14,600 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (Akuntabilitas Keuangan) adalah nol maka pengaruh Integritas terjadi sebesar 14,600.

Nilai signifikan berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana menunjukan bahwa variabel Akuntabilitas Keuangan

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat dinyatakan signifikan karena nilai signifikansi variabel Akuntabilitas Keuangan lebih kecil dari nilai signifikansi α yaitu 0,05. Hal ini menunjukan bahwa variabel independen Integritas memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pada dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare.

Hasil perhitungan di atas menunjukkan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ (5.874 ≥ 2.068) t hitung lebih besar dari pada t tabel, maka dapat diketahui bahwa Integritas berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare. Maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan bahwa pelaksanaan Integritas pada dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare telah sesuai dan adannya pengaruh Akuntabilitas Keuangan pasca pelaksanaan Integritas.

D. Pembahasan

Akuntabilitas (accountability) secara bahasa dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban (Ihyaul Ulum, 2004). Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya (Budi Mulyana, 2006). Menurut The Oxford Advance Learner's Dictionary (dalam LAN RI dan BPKP, 2001), akuntabilitas adalah required or expected to give an explanation for one's action.

Artinya dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan. J.B. Ghartey (dalam modul Pusdiklatwas BPKP, 2007) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Sjahruddin Rasul (dalam modul Pusdiklatwas BPKP, 2007) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan

instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat. Miriam Budiardjo (1998) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Senada dengan Miriam Budiardjo, dalam konteks organisasi sektor publik Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung.

a. Dimana dalam draf kuesioner pertanyaan nomor 1 yang diajukan kepada respoden menyatakan bahwa sangat setuju.
b. kemudian dilanjutkan kepada pertnyaan ke-2 dimana peneliti mengajukan pertanyaan ”apakah ASN selalu menimbang permasalahan berikut akibat -akibatnya dengan seksama” dimana berdasarkan hasil kuesioner dari seluruh jumlah responden mengatakan sangat setuju.
c. kemudian dilanjutkan pada pertanyaan ke-3 dimana peneliti mengajukan pertanyaan “apakah ASN tidak mempertimbangkan keadaan seseorang / sekelompok orang atau suatu unit organisasi untuk membenarkan perbuatan melanggar ketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku” dimana berdasarkan hasil kuesioner dari seluruh jumlah responden mengatakan sangat setuju.
d. Kemudian dilanjutkan pada pertanyaan ke-4 dimana peneliti mengajukan pertanyaan “apakan ASN harus memiliki rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai kesulitan” dimana berdasarkan hasil kuesioner dari seluruh jumlah responden mengatakan sangat setuju.
e. Kemudian dilanjutkan pada pertanyaan ke-5 dimana peneliti mengajukan pertanyaan “apakah Pelaksanaan kebijakan

dipertanggungjawabkan ke pemerintah daerah" dimana berdasarkan hasil kuesioner dari seluruh jumlah responden mengatakan sangat setuju.

f. Kemudian dilanjutkan pada pertanyaan ke-6 dimana peneliti mengajukan pertanyaan "apakah Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD sesuai dengan realisasinya serta mempunyai kepentingan bagi publik" dimana berdasarkan hasil kuesioner dari seluruh jumlah responden mengatakan sangat setuju.
g. Kemudian dilanjutkan pada pertanyaan ke-7 dimana peneliti megajukan pertanyaan "apakah Program-program dinas PP & KB kota Parepare dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal" dimana berdasarkan hasil kuesioner dari seluruh jumlah responden mengatakan sangat setuju.
h. Kemudian dilanjutkan pada pertanyaan ke-8 dimana peneliti mengajukan pertanyaan "apakah Penggunaan dana anggaran dinas PP & KB kota Parepare didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku" dimana berdasarkan hasil kuesioner dari seluruh jumlah responden mengatakan sangat setuju.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan evaluasi dalam pelaksanaan Integritas pada dinas PP & KB Kota Parepare

meliputi empat aspek. Meliputi faktor penerapan Integritas yang berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh dinas pp 7 kb sebagai hasil tindak langjut kedepannya yang terdiri dari tiga atribut (Kognatif, Afektif, dan Konatif).

1. aspek kognitif., yaitu Aspek kognitif ialah unsur yang berkaitan dengan pengetahuan ASN yang ditunjukkan dengan kepercayaan ASN terhadap motivasi dan *fit* (kesesuaian) Pelaksanaan integritas yang dilakukan dinas pp & kb kota Parepare. Artinya dinas pp & kb kota prepare sebaiknya mengambil langkah-langkah berikut agar aspek kognitif ASN dapat ditingkatkan yaitu :
    a. Diperlukan sosialisasi pelaksanaan integritas pada dinas pp & kb kota parepare melalui berbagai macam cara agar pengetahuan ASN mengenai pelaksanaan integritas dapat meningkat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan ASN mengenai pelaksanaa integritas mempengaruhi loyalitas lebih tinggi dibandingkan ASN yang tidak mengetahui pelaksanaan integritas .pada dinas pp & kb kota Parepare
    b. Kepercayaan ASN terhadap pelaksanaan integritas perlu ditingkatkan, karena berdasarkan hasil penelitian, masih ada sebagian kecil ASN yang menganggap pelaksanaan

integritas ini hanyalah bertujuan promosi dan tidak murni bertujuan baik. Peningkatan kepercayaan ASN dapat dicapai jika program yang dilaksanakan bersifat *sustainable* dan konsisten atau tidak karitatif (putus-sambung).

2. aspek afektif, yang berkaitan dengan perasaan (senang atau tidak senang) ASN pada penerapan integritas pada dinas pp & kb kota Parepare. Langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan agar aspek afektif dapat meningkat adalah:
   a. Perusahaan sebaiknya membuat pelaksanaan integritas yang tepat sasaran. Berdasarkan penelitian, masih terdapat sebagian kecil ASN yang menganggap pelaksanaan integritas ini belum tepat sasaran. Artinya dinas pp & kb kota Parepare perlu mengkaji secara teliti atau membuat kriteria tertentu.
   b. Perusahaan harus jeli melihat kebutuhan masyarakat. Dengan membuat pelaksanaan integritas yang sesuai dengan keinginan masyarakat, perasaan senang ASN pun bisa ditingkatkan. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini, dians pp & kb kota Parepare bisa melakukan wawancara dengan perwakilan/tokoh masyarakat atau menyebarkan

angket kepada masyarakat atau melakukan observasi langsung. Sehingga pelaksanaan integritas yang dibuat adalah program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Aspek konatif berkaitan dengan kecenderungan asn untuk berperilaku terhadap penerapan integritas. Yang dapat dilakukan dinas pp & kb kota Parepare agar perilaku ASN terhadap pelaksanaan dapat bersifat positif adalah: Pelaksanaan integritas sebaiknya melibatkan/memberdayakan masyarakat (comunity development). Sehingga masyarakat merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan integritas. Keterlibatan masyarakat akan menghilangkan sikap apatis, sehingga pelaksanaan integritas pada dinas pp & kb kota Parepare akan memperoleh dukungan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh integritas terhadap pelaksanaan akutabilitas keuangan pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota parepare menujukan angka persentase 60%, serta terdapat 40% variabel diluar penelitian.

   Dalam penelitian ini pun bahwa pengaruh integritas terhadap akuntabilitas keuangan memberikan dampak yang besar pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota parepare serta seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ASN pada dinas yang menjadi lokasi penelitian terdapat komitmen dalam akuntabilitas laporan keuangan.

   Sehingga dalam perkembangan tersebut telah meningkatkan kinerja semangat dan kontribusi tim dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan.

B. Saran

Diperlukan rumusan tujuan yang jelas agar dapat mengukur dan menilai keberhasilan pelaksanaan integritas pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota parepare, sehingga evaluasi pelaksanaan integritas dapat maksimal. Selain

itu perlu diperhatikan ketepatan indikator menerapan integritas perlu dipertimbangkan dengan matang agar tidak tumpang tindih diperlukannya pengkatan kualitas bagi ASN melalui diklat agar meningkatkan kemampuan dalam mewujudwakan akuntabilitas keuangan yang masif. Sehingga dapat menjadi contoh bagi dinas-dinas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aribowo, Fajar. 2007. Laporan Keuangan Daerah Perlu Akuntabilitas. Harian Bisnis Indonesia. 19 November 2007.

Ayuningtyas, H. Y. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah). Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Bramantya Adhi Cahya. 2010. Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) (studi pada bank di indonesia periode tahun 2007-2008). Fakultas ekonomi universitas diponegoro. Semarang. Dari ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/953

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2020. Panduan Penyusunan *Skripsi.* Parepare. Universitas Muhammadiyah Parepare.

Gunawan, Lie David. 2012. Pengaruh Tingkat Independensi, Kompetensi, Obyektifitas dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit yang Dihasilkan Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 1(4), pp:44-48.

Handayani, Ika. 2011. Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Industri Tekstil Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Dari repository.usu.ac.id/handle/123456789/29007.

Harjanto, Atta Putra. 2014. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Objektivitas, Akuntabilitas dan Integritas terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Kap Di Semarang). Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Harmawati. 2016. pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dari repositori.uin-alauddin.ac.id/2471/

Hendry Andres Maith. 2013. Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Dari ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2130/1692

Mardiasmo. 2004. Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara. Media Akuntansi 39/April/Tahun XI/2004, Hal 24.

Mohamad, Ismail dkk. 2004. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Edisi Kedua. http: www. lan.go.id.

Rahardjo, Wiharta. 2010. Pengaruh Posisi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Dari digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/12554/

Rahayu, Sri. 2010. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Goog Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. Fakultas Ekononi Universitas Diponegoro Semarang. Dari eprints.undip.ac.id/23232/

Sukriah, Ika., Akram., Biana. A. 2009. "Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompettensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan". Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.

Tarigan, Sabri. 2011. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.